



Essay

Kaji Ulang Hubungan Agama dan Politik

Ahmad Ali Nurdin

Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Indonesia

e-mail: nurdinster@gmail.com

Anda mungkin pernah mendengar ucapan terkenal dari Nietzsche bahwa Tuhan Telah Mati. Memang hampir beberapa abad belakangan, para ilmuwan sosial percaya bahwa agama dan organisasi-organisasi keagamaan akan hilang dan lepas dari kehidupan sosial atau bahkan kehidupan pribadi manusia. Mereka percaya bahwa arus modernisasi dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memusnahkan kepercayaan manusia modern terhadap Dzat Yang Maha atau Tuhan. Masyarakat modern akan tidak percaya lagi terhadap kekuatan lembaga keagamaan untuk melahirkan kesejahteraan sosial. Hanya saja prediksi seperti itu seolah tidak terbukti terutama kalau melihat hasil survey yang dilakukan oleh World Values Survey (WVS). Dalam hasil survey terbarunya, WVS menyebutkan bahwa lebih dari tiga perempat responden dari 43 negara di dunia masih mempunyai kepercayaan dan yakin adanya Dzat supernatural atau Tuhan. 63% responden merasa diri mereka masih religius dan bahkan 70% mengklaim menganut salah satu kepercayaan agama yang ada di dunia.¹

Begitu juga dalam kehidupan berpolitik, peran agama dianggap akan hilang dan tidak berpengaruh lagi. Tetapi kenyataannya sekarang, hubungan antara agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Agama masih dianggap 'faktor penting dan signifikan' ketika dibicarakan dalam urusan politik, hubungan agama dengan negara dan kekuasaan bahkan semakin menunjukkan peran signifikan dalam percaturan politik global. Terlibat aktifnya para agamawan dalam aktivitas politik di beberapa negara termasuk

¹ Ronald F Inglehart, *Religion's Sudden Decline What's Causing It, and What Comes Next?* (England: Oxford University Press, 2021).

di Indonesia adalah diantara buktinya. Bahkan tidak jarang simbol-simbol agama digunakan dalam meraih tujuan politik.

Karenanya, pembahasan tentang hubungan antara agama dan politik masih perlu dikaji ulang. Tulisan ini berusaha mendiskusikan hubungan agama dan politik yang saling mempengaruhi serta pentingnya peran agama dalam politik. Agama dan politik adalah dua entitas yang saling mempengaruhi. Perlu juga dijawab pertanyaan tentang posisi agama dalam kajian disiplin Ilmu Politik serta mengklarifikasi mitos yang menyebutkan bahwa peran agama dalam politik menurun, padahal banyak muncul akhir-akhir ini ketertarikan kembali negara terhadap isu-isu agama. Dan begitu sebaliknya, ketertarikan agamawan bukan hanya mendiskusikan isu-isu politik di sebuah negara, tetapi juga terjun aktif berpolitik.

Agama dan Politik Saling Mempengaruhi

Sebagaimana didefinisikan oleh Charles Liebman² agama dan politik membicarakan isu-isu politik yang berhubungan agama, organisasi, partai politik, dan kelompok kepentingan yang konsen dengan isu-isu agama. Ketika institusi itu berkembang, masing-masing institusi cenderung mengembangkan kepentingan mereka dan mencoba melegitimasi dengan terminologi agama. Artinya meskipun kadang-kadang kepentingan mereka tidak begitu jelas berhubungan dengan nilai-nilai agama atau kepentingan pemeluk agama, mereka mencoba menghubungkan-hubungkannya dengan kepentingan agama. Organisasi atau institusi ini tidak jarang mengklaim bahwa tuntutan yang mereka ajukan adalah cukup legitimate karena sama dengan tuntutan komunitas agama.

Menurut Anthony Gill³ dengan adanya kelompok agama yang berpartisipasi dalam politik, maka akan melahirkan 'kaum elit agamawan'. Hal ini terjadi bukan untuk membuat tokoh agama menjadi lebih kuat (powerful), tetapi agar supaya pimpinan-pimpinan politik dari kelompok agama menjadi lebih berperan dan berkuasa. Lebih jauh seperti yang dikemukakan oleh Leibman, pertanyaan yang lebih penting adalah

² Charles S. Religion Liebman, *Democracy and Israeli Society* (London, New York: Routledge, 2017).

³ Anthony Gill, "Religion and Comparative Politics," *Annual Review of Political Science* 4, no. 1 (2001): 117-38, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.117>.

bagaimana agama yang dianggap sebagai aspek kultural berpengaruh secara lebih luas terhadap kultur politik dan kebijakan publik.

Ada juga cara lain agama mempengaruhi politik. Agama tidak hanya memproyeksikan ide tentang apa yang benar dan apa yang salah, tetapi juga memproyeksikan imej atau konsepsi tentang sisi alamiah dunia. Lebih jauh, agama bisa mempengaruhi masyarakat, bukan hanya oleh apa yang agama katakan tentang masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat distrukturisasi atau dibuat struktural hirarkis.

Indikator-indikator empiris dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kepercayaan serta praktek keagamaan yang ada di masyarakat saat ini masih sama seperti kepercayaan masyarakat dua abad yang lalu, kalau tidak mau dikatakan lebih kuat.⁴ Kelompok-kelompok keagamaan terus bermunculan di dunia bahkan dipandang lebih cepat dari prediksi para penganut teori sekularisasi. Bahkan di negara-negara komunis atau negara eks-komunis, kelompok-kelompok spiritual menolak untuk gulung tikar bahkan sebaliknya lebih meningkatkan kembali kegiatan mereka setelah berabad-abad hidup dalam pemerintahan yang selalu menekan dan refresif.⁵

Hanya saja, kebanyakan para ilmuwan politik perbandingan atau umumnya para ahli politik masih memandang agama sebagai subjek penelitian yang marginal atau *a peripheral subject matter*. Hal ini mungkin saja terjadi karena para peneliti dalam ranah bidang ini masih terpengaruh oleh thesis sekularisme yang dianggap masih valid dan kuat. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang cukup serius yang perlu diperbaiki, paling tidak menurut Anthony Gill⁶ disebabkan karena dua alasan. Pertama, fakta menguatnya kepercayaan keagamaan dan organisasi-organisasi agama hampir di semua negara di dunia menunjukkan bahwa menyepelekan atau mengabaikan agama berarti mengabaikan salah satu variabel penting dalam menjelaskan politik di suatu negara. Para peneliti Revolusi Iran 1979 terkejut dengan melihat fakta kuatnya potensi Islam dalam memobilisasi masa di Negara yang kelihatannya sedang menuju proses modernisasi (sekularisasi)

⁴ Rodney Stark, "Secularization, R.I.P.," *Sociology of Religion* 60, no. 3 (1999): 249, <https://doi.org/10.2307/3711936>.

⁵ Andrew Greeley, "A Religious Revival in Russia?," *Journal for the Scientific Study of Religion* 33, no. 3 (1994): 253, <https://doi.org/10.2307/1386689>.

⁶ Gill, "Religion and Comparative Politics."

seperti Iran. Begitu juga, tidak banyak orang yang berharap dan mengira bahwa pihak gereja Katolik akan menjadi pemain kunci dalam menumbangkan komunisme di Polandia. Fakta lainnya, mobilisasi pemilih kaum minoritas Protestan di Peru yang menyebabkan Alberto Fujimori memenangkan pemilihan pada putaran pertama tahun 1992 dan menjadikannya presiden banyak mengagetkan orang. Dan di beberapa negara seperti Algeria, India, Yugoslavia, termasuk di beberapa negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa motivasi agama bisa menyebabkan konflik politik yang kadang bisa menyebabkan konflik berdarah-darah. Karenanya, tanpa diragukan lagi bahwa, agama masih terus menampakkan kehadirannya dalam realitas politik global.

Alasan kedua, studi agama perlu diperhatikan karena fakta bahwa inspirasi yang muncul dari riset-riset tentang agama dan kepercayaan serta riset organisasi keagamaan telah menjadi pertanyaan penting bagi para ilmuwan politik perbandingan. Tema besar seperti aksi kolektif dan hubungan antara ide dan institusi atau lembaga segera saja muncul ke dalam pikiran jika mengaitkannya dengan agama. Contohnya, gerakan-gerakan keagamaan telah menunjukkan kemampuan yang dahsyat dalam memobilisasi aksi kolektif sebuah kelompok, termasuk aksi mereka dalam protes politik.⁷ Fakta yang jelas bahwa Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, dan Hinduism terus menarik bagi para pemeluknya setelah berabad-abad menunjukkan kekuatan mereka bisa memobilisasi kekuatan agama untuk melakukan sebuah gerakan. Tradisi spiritual agama-agama ini juga telah berfungsi sebagai alat untuk mobilisasi politik.

Lebih jauh Anthony Gill⁸ menyebutkan bahwa meskipun agama masih menjadi topik marginal di kalangan ilmuwan Politik Perbandingan, dua decade terakhir menunjukkan adanya 'ketertarikan baru' untuk studi dan riset tentang agama di kalangan akademisi. Didorong oleh pertumbuhan mengagumkan gerakan fundamentalis pada beberapa agama besar seperti—Judaism, Christianity, Islam, dan Hinduism—ketertarikan terhadap agama ini menunjukkan trend naik. Bahkan faktanya bukan hanya sisi gerakan kaum fundamentalis agama yang menjadi pusat perhatian, tetapi kajian-kajian yang melihat sisi toleran agama dan bagaimana agama menjadi penggerak politik

⁷ Smith C, *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism* (New York: Routledge, 1996).

⁸ Gill, "Religion and Comparative Politics."

yang *'peaceful'* dan *compatibility*-nya dengan isu-isu demokrasi kontemporer mulai banyak dikaji orang.

Dimanapun di dunia, sejak akhir tahun 1970an, kita menyaksikan meningkatnya keterlibatan politik para actor agama (agamawan) baik lokal di masing-masing negara maupun dalam pergaulan internasional. Untuk konteks Indonesia, sebagai negara dengan ideologi Pancasila yang sila utamanya berketuhanan Yang Maha Esa, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai agama, dan agamawan sangat berperan dalam politik Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Kontestasi pemikiran apakah ideologi negara adalah agama (Islam) atau sekuler sudah ada sejak founding fathers Indonesia merancang kemerdekaannya. Polemik antara Soekarno dan Natsir menjadi fakta sejarah bagaimana agama masuk dalam diskursus politik Indonesia. Hal ini dilanjut dengan masa Orde Lama, Orde Baru bahkan sampai Orde Reformasi. Aktifnya para agamawan dalam diskursus ini bisa dilihat dalam bentangan sejarah politik Indonesia sampai sekarang. Terpilihnya almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden Indonesia dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa agamawan dalam hal ini tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama (NU), menjadi bukti penting bahwa irisan antara agama dan politik tidak bisa diabaikan dalam sejarah politik Indonesia.

Karenanya, untuk membahas hubungan antara agama dan politik, menurut Anna Grzymala-Busse⁹ kita perlu menelisik agama secara serius dan dalam. Pertama, bagaimana agama berbeda dari identitas lain seperti identitas etnik, kelas social dan negara? Apakah agama sekedar komoditas atau ada sesuatu yang unik tentang agama? Kedua, jika agama penting dan berpengaruh, bagaimana dan kapan doktrin agama bisa berbeda dan membuat perubahan? Ilmu Politik memandang identitas dan doktrin agama dengan label komoditas yang fungsional tetapi substansinya kecil untuk perkembangan keilmuan. Para ilmuwan sosial terkadang mengabaikan fakta bahwa diantara agama-agama yang ada: Islam, Katolik, Protestan maupun Yahudi, memiliki perbedaan baik itu dari sisi doktrin maupun perbedaan interpretasi di internal agama masing-masing. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya berimplikasi bagi para pemeluk agama-agama tetapi

⁹ Anna Grzymala-Busse, "Why Comparative Politics Should Take Religion (More) Seriously," *Annual Review of Political Science* 15, no. 1 (2012): 421-42, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033110-130442>.

juga mempunyai konsekwensi logis ketika menghubungkan antara agama dan politik.

Posisi Agama dalam Kajian Politik

Menurut Miroljub Jevtic (n.d) politik menjadi satu disiplin ilmu mandiri yang dipelajari di universitas-universitas dimulai sejak abad ke 17 setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Belanda dan Inggris sekitar abad 16 dan 17 dan revolusi Amerika dan Prancis. Ketika itu kajian ilmu-ilmu sosial semakin berkembang dan muncullah kajian ilmu politik yang ditandai dengan berdirinya *L'academie des sciences morales et politiques* di Paris tahun 1795. Meskipun sebenarnya di tahun ini, kajian ilmu politik masih bagian dari pusat kajian pendidikan, pilsafat, ekonomi politik dan hukum.

Baru pada akhir abad 19 dan awal abad 20, lahir sebuah institusi di Paris yang khusus membahas kajiannya tentang study politik bernama *L'Ecole Libre des sciences Politiques* tahun 1872, yang nantinya berubah menjadi *L-Institut d' Etudes Politiques*. Gairah study politik ini juga berkembang di negara-negara lainnya seperti Inggris dan Amerika dan sebagian akademisi berpendapat bahwa awal lahirnya ilmu politik modern adalah di Amerika pada awal abad 20.

Topik-topik yang dibahas diawal kemunculannya disiplin ilmu politik menurut Miroljub Jevtic¹⁰ adalah: negara dan pemerintahan, proses politik, partai politik, perbandingan system politik, teori-teori politik dll. Karenanya kita bisa berpendapat bahwa ilmu politik sebagai sebuah disiplin ilmu, merupakan ilmu baru yang belum lama berdiri sendiri, meskipun subject penelitian politik sudah dikaji orang sejak munculnya peradaban manusia yang bisa kita temui dalam karya-karya Aristoteles, Plato dan filosof-filosof Yunani lainnya.

Sementara kajian agama dalam konteks politik bukanlah hal yang baru. Organisasi-organisasi politik zaman Babilonia dan Mesir kuno ataupun Israel selalu berkaitan dengan sesuatu yang disebut 'tuhan'. Karena legitimasi sebuah kekuasaan di zaman itu memerlukan legitimasi ketuhanan, maka analisis tentang fungsi pemerintahan dan kekuasaan mau tidak mau berhubungan dengan simbol-simbol ketuhannya atau agama. Tetapi pada perkembangannya, terutama setelah perang dunia kedua usai, menurut

¹⁰ Miroljub Jevtic, "Political Science and Religion," n.d.

Miroljub Jevtic ada dua paradigma yang berbeda ketika memandang ilmu politik hubungannya dengan agama. *Pertama*, pandangan yang diwakili oleh pilosof Prancis seperti Holbach, Helvetius, Diderot dan lain-lain yang berpendapat bahwa agama adalah produk dari keterbelakangan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat yang tidak tercerahkan (*unenlightened*). Dengan pandangan ini, agama jarang sekali dipakai sebagai subject dari research-research politik. Akibatnya, para ilmuwan politik menjelaskan proses politik, organisasi politik, regim politik, partai politik dll benar-benar menggunakan pendekatan kerangka berpikir materialistik an sich (*a purely materialistic framework*), dan sama sekali melupakan pengaruh agama, meskipun sebenarnya harus diakui bahwa agama pasti berpengaruh.

Kedua, pandangan yang dipopulerkan oleh Alexis de Tocqueville pada abad 19 yang berpendapat bahwa agama bukanlah produk dari keterbelakangan ekonomi dan masyarakat yang tidak tercerahkan. Buktinya, ketika ekenomi dan pendidikan masyarakat meningkat, peran agama menjadi semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya.

Contoh yang jelas dari premis ini adalah kasus di Amerika. Ketika pembangunan ekonomi Amerika meningkat, kesadaran keagamaan masyarakatnya juga meningkat. George Gallup¹¹ bahkan menyebutkan bahwa berdasarkan data sensus, 50 tahun belakangan ini merupakan abad dimana orientasi keagamaan orang Amerika paling tinggi dalam sejarah negara ini. 1 dari 3 orang Amerika dewasa (36%) mengatakan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada mereka dan setengah dari responden yang di interview percaya bahwa Tuhan hari ini berbicara kepada mereka lewat Bible dan kitab-kitab suci lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa perkembangan di Amerika ini juga berlaku di negara-negara Barat lainnya yang membuat para ahli ilmu politik mulai memperhatikan lagi peran agama dalam politik. Bangkitnya peran agama dalam politik bisa dilihat pada agama-agama besar seperti peran Islam dalam politik global, peran Budhism di Tibet, gerakan Budhism di South Vietnam, suksesnya partai politik Bhuda Komeito di Jepang, suksesnya partai Hindu Baratiya Janata di India dan juga peran Roman Katolik dalam politik Polandia.

¹¹ Gallup George, "Religion in America, US Society and Values," *Electronic Journals of the US Information Agency*, 2, no. 1 (2001).

Perkembangan di atas membuat para ilmuan politik memfokuskan research-research individual mereka yang berkaitan dengan agama dan politik. Begitu juga mendorong munculnya institusi-institusi research (research centre) yang memfokuskan kajiannya tentang peran agama dan politik. Hal inilah yang mendorong munculnya disiplin ilmu baru yang dikenal dengan Religion and Politics.

Sebagai disiplin ilmu baru (pertengahan abad kedua puluh), subject research dari ilmu ini terus berkembang. Meskipun demikian, Miroljub Jevtic mengidentifikasi empat kajian research ilmu politik berbau agama ini yaitu:

Pertama, penjelasan ajaran dan perilaku dari dogma dan doktrin agama yang kelihatan secara nyata, langsung dan terbuka berkaitan dengan politik. Ranah kajian pertama ini berisi tentang kajian dogma atau doktrin agama yang berkaitan dengan negara, political power, legitimasi politik, political sovereignty (kekuasaan), otoritas politik, demokrasi, organisasi politik, pandangan tentang perdamaian dan peperangan (peace and war), toleransi agama, HAM, fundamentalisme, ekstrimisme agama, terorisme agama, peran sekularisme dll. Pada kajian ini, misalnya, mencoba mendiskusikan bagaimana teks agama baik Islam, Kristen dan yang lainnya berbicara tentang bentuk negara, toleransi, demokrasi, kesetaraan gender dan doktrin lainnya.

Kedua, praktek-praktek keagamaan yang tidak kelihatan secara nyata mempunyai pesan politik, tetapi bisa memprovokasi dan mempunyai konsekwensi politis. Ranah kajian ini berkaitan dengan praktek-praktek keagamaan yang bersipat teologis dipermukaan, tetapi bisa menimbulkan konsekwensi politik. Contohnya, cara-cara beribadah, propaganda agama, pembangunan gereja, mesjid, ibadah naik haji, pemilihan paus dan pendeta dll. Sangat jelas bahwa perjalanan haji ke Mekkah pasti mempunyai signifikansi politik sebagaimana signifikansi politik pemilihan Paus pada Roman Katolik atau pemberian sangsi kepada pendeta di sebuah negara.

Ketiga, sikap partisipan politik dalam kehidupan politik (authoritas negara, partai politik, politisi, oposisi dll) terhadap agama dan komunitas agama. Ranah kajian ini akan berbicara tentang hubungan antara kelompok agama dengan negara seperti bagaimana konstitusi negara (negara seculer atau teokrasi), keberadaan kebebasan agama dalam hukum negara, hubungan antara partai politik yang berbau agama, oposisi yang berbau agama dll.

Keempat, bentuk-bentuk aksi sosial dan politik yang kelihatannya sama sekali tidak berhubungan dengan agama tetapi mempunyai konsekwensi politik dan agama. Contohnya, proses tender pekerjaan dan jasa yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan agama secara umum, tetapi jika hal ini terjadi di sebuah negara yang multi agama, tetapi semua kontrak pekerjaan itu hanya diberikan kepada kontraktor yang berasal dari agama tertentu, maka hal ini bisa memprovokasi komunitas agama lainnya untuk beraksi dan mempunyai konsekwensi politik yang signifikan.

Empat ranah kajian yang dikemukakan Jevtic di atas nampaknya sekarang ini sudah menjadi banyak perhatian para peneliti di berbagai negara termasuk di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menguatkan thesis bahwa hubungan agama dan politik memang tidak bisa diabaikan. Bahkan kajian-kajian kontemporer sekarang tentang isu-isu politik berbau agama diduga kuat sudah melebihi batas empat kajian yang dikemukakan Jevtic di atas. Wajar, jika klaim beberapa kalangan yang mengatakan bahwa peran agama dalam politik menurun dikatakan sebagai mitos belaka.

Peran Agama dalam Politik Menurun adalah Mitos?

Sebelumnya, banyak akademisi yang yakin dan percaya bahwa kepercayaan dan partisipasi keagamaan individual di Eropa menurun, ketika modernisasi meningkat. Dimulai dengan tingginya kepercayaan dan praktek keagamaan pada akhir abad 18, kemudian trend nya terus menurun yang mencapai puncak kulminasi penurunan keberagamaan di zaman sekarang. Sebagai bukti klaim ini, kita diarahkan dengan cara melihat menurunnya umat Kristen yang hadir ke gereja di Eropa. Tesis ini menyebutkan bahwa terjadinya erosi kepercayaan dan sedikitnya orang yang hadir di gereja menunjukkan bahwa rasa percaya kepada yang super sebagai motif seseorang beribadah sedang menurun. Padahal, pandangan seperti ini adalah salah dalam segala aspek.

Menurut R. Stark (1999) David Martin adalah Sosiolog kontemporer pertama yang menolak thesis sekularisme secara total, bahkan ia mengusulkan agar konsep sekularisasi ini dihilangkan dari diskursus ilmiah ilmu sosial. Karena menurutnya, konsep ini kesannya sangat ideologis (bukan teoritis) dan menimbulkan banyak polemik. Lebih jauh, tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia bergeser dari 'periode

sangat beragama' menuju 'periode sekuler'.¹² Ketika melihat begitu populernya doktrin sekularisasi dikalangan para filosof abad delapan belas, Alexis de Tocqueville seperti dikutip Stark¹³ berkomentar:

Sayangnya, fakta di lapangan berbeda dengan teori. Ada beberapa penduduk tertentu di Eropa yang tidak mempunyai kepercayaan agama, penyebabnya adalah karena kebodohan mereka; sementara di Amerika, salah satu negara paling bebas dan paling tercerahkan di dunia, orang-orangnya penuh dengan semangat menyambut tugas-tugas keagamaan.

Lebih dari seratus lima puluh tahun sejak Tocqueville melakukan observasi itu, keberagamaan penduduk Amerika bukannya menurun tetapi justru keanggotaan gereja di Amerika naik lebih dari tiga kali lipat¹⁴, bahkan komitmen mereka terhadap agama menunjukkan kecenderungan naik. Kalau kasus di Amerika menunjukkan banyaknya tantangan terhadap sekularisasi, sementara di Eropa juga menunjukkan bahwa sekularisasi tidak berhasil atau gagal. Buktinya, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi keagamaan masyarakat Eropa dalam waktu yang cukup panjang. Meskipun partisipasi keagamaan masyarakat di institusi-institusi keagamaan di Eropa bervariasi dari waktu ke waktu (naik turun) karena alasan perang atau revolusi, tetapi yang penting untuk dicatat adalah bahwa partisipasi keagamaan masyarakat Eropa Utara dan Barat sangat rendah berabad-abad sebelum lahirnya modernisasi.

Alasan kedua untuk menolak klaim suksesnya sekularisasi di Eropa adalah data terkini tidak menunjukkan lahirnya masa 'atheisme ilmiah (scientific atheism)'. Tingkat religiusitas atau keberagamaan masyarakatnya sampai saat ini tetap tinggi. Karenanya pertanyaan penting tentang agama di Eropa adalah bukan mengapa orang Eropa tidak lagi percaya kepada agama, tetapi mengapa mereka tetap percaya kepada agama tetapi tidak melihat perlunya berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di institusi keagamaan (seperti gereja) secara rutin? Dari dua alasan dasar menolak klaim sekularisasi berhasil di Eropa, klaim bahwa partisipasi keagamaan tidak

¹² David Martin, "The Secularization Issue: Prospect and Retrospect," *The British Journal of Sociology* 42, no. 3 (1991): 465, <https://doi.org/10.2307/591190>.

¹³ Stark, "Secularization, R.I.P."

¹⁴ Darryl G Hart, "The Churaching of America, 1776-1990: Winners and Losers in Our Religious Economy; By Roger Finke and Rodney Stark New Brunswick, Rutgers University Press, 1992.," *Theology Today* 50, no. 3 (1993): 497-99, <https://doi.org/10.1177/004057-369305000329>.

pernah tinggi di Eropa Utara dan Eropa Barat inilah yang seharusnya menjadi perhatian para pembaca.

R. Stark¹⁵ menyebut Steve Bruce dari Universitas Aberdeen sebagai salah satu diantara tokoh yang paling vokal dalam mendukung tesis sekularisasi. Akhir-akhir ini dia mengakui bahwa, dalam hal partisipasi keagamaan masyarakat yang terorganisir, Masa Keemasan Kepercayaan (Golden Age of Faith) tidak pernah ada. Karenanya, Bruce¹⁶ mengungkapkan bahwa gereja zaman pertengahan bahkan tidak pernah perhatian membawa massa untuk beragama. Bruce bukannya menyerah dengan tesis sekularisasi yang diyakininya, tetapi bahkan kemudian ia mengklaim bahwa Masa Keemasan religiusitas abad pertengahan adalah subyektif, dalam arti bahwa masyarakat secara kuat mempercayai kepercayaan supernatural, Kristen atau yang lainnya. Dengan kata lain, Bruce mengklaim bahwa jika masyarakat abad pertengahan jarang pergi ke gereja, orang pada waktu itu harus dipandang sebagai masyarakat religius karena mereka percaya akan sesuatu yang super. Betul, bahwa mayoritas masyarakat zaman pertengahan tersebut mempunyai kepercayaan keagamaan, meskipun kepercayaan keagamaan mereka termasuk samar termasuk kepercayaan kepada magic dan animisme sebagaimana kepercayaan mereka kepada agama Kristen dan karena itu melalui keimanan atau kepercayaan, meskipun bukan melalui praktek keagamaan, mereka masih harus dipandang sebagai masyarakat beragama.¹⁷

Jika sekularisasi betul-betul hadir dan melanda semua kalangan dan tempat, maka sekularisasi juga harus menimpa kalangan ilmuwan (scientist)! Benarkah demikian? Riset-riset terkini menunjukkan bahwa klaim adanya konflik atau pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan adalah cerita fiksi belaka dan faktanya para ilmuwan tidak secara otomatis menjadi tidak beragama. Mereka bahkan seperti masyarakat umum biasa pergi ke gereja. Bahkan cukup mengejutkan adanya fakta bahwa diantara kalangan akademisi Amerika, tingkat keberagamaan yang lebih tinggi terjadi pada akademisi yang bidang keilmuannya tinggi atau lebih ilmiah. Contohnya, ilmuwan fisika dan ilmu alam termasuk matematika mengidentifikasi dirinya dua kali lebih besar sebagai orang beragama (religious person) dibandingkan

¹⁵ Stark, "Secularization, R.I.P."

¹⁶ Steve Bruce, "The Pervasive World-View: Religion in Pre-Modern Britain," *The British Journal of Sociology* 48, no. 4 (1997): 667, <https://doi.org/10.2307/591602>.

¹⁷ Eamon Duffy, *Stripping of the Altars* (New Haven: CT: Yale university Press, 1992), <https://doi.org/10.1086/ahr/99.1.224-a>.

dengan ilmuan bidang antropologi (antropolog) dan psikologi atau psikolog.¹⁸

Runtuhnya negara komunis Soviet mempunyai konsekwensi besar, diantaranya menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan cukup signifikan beberapa generasi yang berusaha keras mendoktrinasi atheisme di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Sebagaimana disebutkan oleh Andrew Greeley¹⁹: "Tidak ada sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan usaha bersama untuk membunuh atau meminggirkan bukan hanya sebuah agama, bahkan semua agama (seperti yang dilakukan Komunis) Komunisme Atheis berpendapat bahwa proses sekularisasi tidak bisa dihindarkan dan agama akan hilang dari muka bumi."

Dari ukuran apapun bisa dikatakan bahwa kebangkitan agama paska kejatuhan Komunisme di Uni Soviet sedang terjadi dimana-mana. Hal ini membuat hampir semua ilmuan sosial tercengang (melihat fenomena masyarakat yang memandang pentingnya agama dalam kehidupan). Sebagaimana dikemukakan oleh Mary Douglas tahun 1982 yang lalu:

Tak ada seorangpun yang menyadari sebelumnya akan bentuk kebangkitan agama-agama tradisional. Menurut beberapa literatur, perubahan keagamaan (agama) di zaman modern terjadi hanya dalam dua cara –jatuhnya gereja Kristen tradisional (atau apapun bentuk ekspresi keagamaan masyarakat), dan lahirnya sekte-sekte agama baru. Tak ada seorangpun yang memberikan perhatian kepada agama-agama tradisional dengan penuh vitalitas yang menginspirasi revolusi politik dalam skala luas. Kebangkitan gerakan Katolik yang eksplisit di Polandia, yang membuat kekaguman yang dalam dari Barat, sama tidak terprediksinya seperti kebangkitan kaum gereja fundamentalis di Amerika.

Penutup

Perlu ditekankan disini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa suatu hari agama akan menghilang dari kehidupan manusia. Mungkin barangkali suatu hari akan datang ketika agama telah dikesampingkan dari memori umat manusia atau dimusiumkan. Jika pun itu benar terjadi, hal demikian bukan disebabkan oleh modernisasi dan

¹⁸ Stark, "Secularization, R.I.P."

¹⁹ John W Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approache* (California: SAGE Publications, Inc, 1994).

hilangnya keyakinan akan agama. Karenanya, marilah kita sama-sama mendeklarasikan berakhirnya keyakinan ilmu sosial terhadap teori sekularisasi, dengan mengungkapkan bahwa teori sekularisasi merupakan produk dari angan-angan pemikiran yang tidak akan terbukti.

Jika ada ilmuwan politik perbandingan masih memandang agama bukan sebuah subjek penelitian yang penting, hal ini mungkin saja terjadi karena para peneliti dalam ranah bidang ini masih terpengaruh oleh thesis sekularisme yang dianggap masih valid dan kuat. Padahal, fakta menguatnya kepercayaan keagamaan dan organisasi-organisasi agama hampir di semua negara di dunia menunjukkan bahwa menyepelkan atau mengabaikan agama berarti mengabaikan salah satu variabel penting dalam menjelaskan politik di suatu negara. Rintisan awal tentang kajian politik berbau agama yang mula-mula dikembangkan oleh Miroljub Jevtic seperti didiskusikan di atas, sekarang bahkan sudah melampaui. Ke depan, saya yakin subject matter kajian agama dan politik bahkan akan terus diminati oleh para ilmuwan politik. Wajar jika jauh-jauh hari Stark sudah *say good bye* terhadap teori sekularisasi dengan catatannya *Rest in Peace Secularization*.

Daftar Pustaka

- Bruce, Steve. "The Pervasive World-View: Religion in Pre-Modern Britain." *The British Journal of Sociology* 48, no. 4 (1997): 667. <https://doi.org/10.2307/591602>.
- C, Smith. *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism*. New York: Routledge, 1996.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approache*. California: SAGE Publications, Inc, 1994.
- Duffy, Eamon. *Stripping of the Altars*. New Haven: CT: Yale university Press, 1992. <https://doi.org/10.1086/ahr/99.1.224-a>.
- George, Gallup. "Religion in America, US Society and Values." *Electronic Journals of the US Information Agency*, 2, no. 1 (2001).
- Gill, Anthony. "Religion and Comparative Politics." *Annual Review of Political Science* 4, no. 1 (2001): 117–38. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci.4.1.117>.
- Greeley, Andrew. "A Religious Revival in Russia?" *Journal for the Scientific Study of Religion* 33, no. 3 (1994): 253. <https://doi.org/10.2307/->

1386689.

Grzymala-Busse, Anna. "Why Comparative Politics Should Take Religion (More) Seriously." *Annual Review of Political Science* 15, no. 1 (2012): 421–42. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033110-130442>.

Hart, Darryl G. "The Churching of America, 1776–1990: Winners and Losers in Our Religious Economy; By Roger Finke and Rodney Stark New Brunswick, Rutgers University Press, 1992." *Theology Today* 50, no. 3 (1993): 497–99. <https://doi.org/10.1177/004057369305000329>.

Inglehart, Ronald F. *Religion's Sudden Decline What's Causing It, and What Comes Next?* England: Oxford University Press, 2021.

Jevtic, Miroljub. "Political Science and Religion," n.d.

Liebman, Charles S. *Religion. Democracy and Israeli Society*. London, New York: Routledge, 2017.

Martin, David. "The Secularization Issue: Prospect and Retrospect." *The British Journal of Sociology* 42, no. 3 (1991): 465. <https://doi.org/10.2307/591190>.

Stark, Rodney. "Secularization, R.I.P." *Sociology of Religion* 60, no. 3 (1999): 249. <https://doi.org/10.2307/3711936>.